



**WALIKOTA MAKASSAR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR  
NOMOR 7 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS  
MUTANDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA  
DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1951 NOMOR 84)  
SEBAGAI UNDAN-UNDANG TERHADAP  
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KOTA MADYA DAERAH  
TK. II UJUNG POANDANG**

**BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MAKASSAR  
TAHUN 1989**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 8 TAHUN 1990 SERI  
NOMOR C NOMOR 1**



SERI C

NOMOR : 1

**LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG  
NOMOR : 8 TAHUN 1990**

---

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH  
TINGKAT II UJUNG PANDANG**

**NOMOR : 7 TAHUN 1989**

**TENTANG**

**MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS  
MUTANDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN  
1959 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA  
DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN NEGARA  
TAHUN 1951 NOMOR 84)  
SEBAGAI UNDAN-UNDANG TERHADAP  
PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KOTA MADYA DAERAH  
TK. II UJUNG POANDANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
UJUNG PANDANG**

**Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-undang No. 11 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah dan Pasal 22 Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan

Umum Retribusi Daerah, Pajak/Retribusi Daerah dapat ditagih dengan Surat Paksa;

- b. Bahwa untuk mengintensifkan pemasukan keuangan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang Khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah dengan mempergunakan Surat Paksa terhadap penunggakan Pajak/Retribusi Daerah;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka ketentuan-ketentuan tentang penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penempatan Undang-undang Nomor 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran negara Tahun 1957 No. 84) sebagai Undang-undang, perlu diperlakukan secara mutatis mutandis terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang.

**Mengingat** : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran negara Tahun 1974 No. 38, Tambahan Lembaran Negara No. 3037);

2. Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 No.74, Tambahan Lembaran Negara No. 1822) jo. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas daerah Kotamadya Makassardan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene.dan Kepulauan dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1971 No.65 Tambahan Lembaran Negara No. 2970);
3. Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undangn Drt. No. 27 Tahun 1957 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 no. 84) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 No. 63);
4. Undang-undang no.11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 56, Tambahan Lembaran Negara No. 1287) jo. Undang-undang No. 11 drt. Tahun 1957 sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 3, Tambahan Lembaran Negar No.2124.);

5. Undang-undang No.12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Npo. 57, Tambahan Lembaran Negara no. 1288);
6. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Peengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran nehgara tahun 1957 No. 5).

**Dengan Persetujuan :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG  
PANDANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** **PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG TENTANG MEMPERLAKUKAN SECARA MUTATIS MUTANDIS UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 1959 TENTANG PENETAPAN UNDANG-UNDANG DAERURAT NOMOR 27 TAHUN 1957 TENTANG PENAGIHAN PAJAK NEGARA DENGAN SURAT PAKSA (LEMBARAN NEGARA TAHUN 1957 NOMOR 84) SEBAGAIMANA UNDANG-UNDANG , TERHADAP PAJAK/RETRIBUSI DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II UJUNG PANDANG**

## **Pasal 1**

Undang-undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat No.27 Tahun 1957 Tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1957 No. 84) sebagai Undang-undang, yang telah disahkan pada tanggal 26 Juni 1959 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 1959 no. 63 Tanggal 4 Juli 1959 dinyatakan berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pajak/Retribusi Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan ketentuan sebagai berikut :

- A. Kata 'Pajak Negara" dalam Undang-undang tersebut di atas, harus dibaca "Pajak dan retribusi Daerah"
- B. Kata "Menteri Keuangan" dalam undang-undang tersebut di atas harus dibaca "Walikotamadya kepala Daerah Tingkat II Ujung Pandang"
- C. Kata "Kepala Daerah swatantra Tingkat I" dalam Undang-undang tersebut di atas harus dibaca "Kepala Daerah Tingkat II"

## **Pasal 2**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Ujung Pandang.

Ujung Pandang, 23 Nopember 1989

Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kotamadya Daerah  
Daerah Tingkat II  
Ujung Pandang

Walikotamadya Kepala  
Daerah Tingkat II  
Ujung Pandang

Ketua,

**CAP/TTD**

**SUWAHNO**

**CAP/TTD**

**Drs. MUH. ARSYAD ABU**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Keputusan  
Nomor 973.53.643 tanggal 11 Agustus 1990

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Madya  
Daerah Tingkat II Ujung Pandang Nomor 8 Tahun Seri c  
Nomor 1 pada tanggal 6 Oktober 1990.

Sekretariat Kotamadya Daerah  
Tingkat II Ujung Pandang,

t.t.d.

Drs. HARUNA RAHMAN  
NIP. 010 054 908

